

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
DI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH**

OLEH:

MULIADI QUENZALO
NPM : 1902110079



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 21 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MULIADI QUENZALO

NPM : 1902110079

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN DISATUAN KERJA PERANGKAT ACEH**

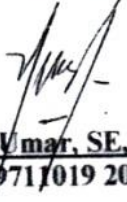
Yang Telah dipertahankan Didepan Komisi Ujian, Pada Tanggal 17 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II


Elviza, SE, M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Tarzanzi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 24 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MULIADI QUENZALO
NPM : 1902110079

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH**

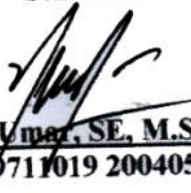
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 17 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

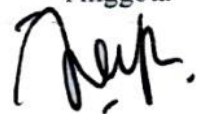
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota


Elviza, SE, M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Anggota


Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK : 19871208 201306 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



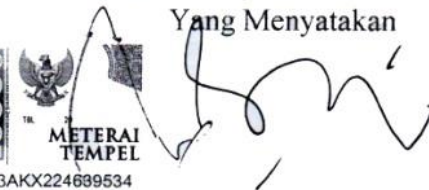
H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK: 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 24 Februari 2023

Yang Menyatakan



MULIADI QUENZALO

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MULIADI QUENZALO**
NPM : **1902110079**
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

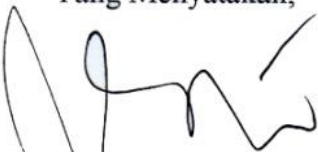
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

Banda Aceh, 24. Februari 2023
Yang Menyatakan,



MULIADI QUENZALO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (SI) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Aslam Nur, MA** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Bapak **Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si,** MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak **Zulkifli Umar, SE, M.Si. Ak. CA** selaku Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu **Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si** selaku Ketua Laboratorium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah aceh.
5. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.Ak dan Ibu Elviza, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ayahanda dan Ibunda serta semua keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira
8. Sahabat-sahabat yang telah banyak memberi dukungan moral dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, Februari 2023

Muliadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Akademis	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
2.1 Kualitas Laporan Keuangan	11
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan	11
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	13
2.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	14
2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	17
2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	17
2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	19
2.2.3 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	19
2.3 Kebijakan Akuntansi	20
2.3.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi	20
2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Akuntansi	22
2.3.3 Indikator Kebijakan Akuntansi	23
2.4 Pengendalian Internal	23
2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal	23
2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian Internal	25
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Pemikiran	37
2.6.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	37
2.6.2 Pengaruh Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	38
2.4 Hipotesis	40

BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1	Desain Penelitian.....	42
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	44
3.2.1	Populasi.....	44
3.2.2	Sampel.....	45
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.3.1	Sumber Pengumpulan Data.....	46
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	47
3.5	Metode Analisis.....	48
3.6	Pengujian Data	49
3.6.1.	Pengujian Validitas	49
3.6.2	Pengujian Reliabilitas	50
3.6.3	Pengujian Asumsi Klasik	50
3.7.	Pengujian Hipotesis.....	53
3.7.1.	Uji Parsial (Uji t).....	53
3.7.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	53
3.7.3	Koefisien Determinasi (R^2)	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1.1	Deskriptif Variabel Penelitian.....	56
4.1.2	Karakteristik Responden	57
4.1.3	Jawaban Responden terhadap Variabel Kinerja SKPD ...	61
4.1.4	Pengujian Validitas	66
4.1.5	Pengujian Reliabilitas	69
4.2	Pengujian Asumsi Klasik	70
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis	73
4.4	Pembahasan.....	76
4.4.1	Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), Kebijakan akuntansi (X_2) dan pengendalian internal (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan.....	76
4.4.2	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	78
4.4.3	Pengaruh kebijakan akuntansi (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	80
4.4.4	Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan	81
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1	Populasi/Responden Penelitian	45
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	47
Tabel 4.1	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
Tabel 4.2	Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3	Jumlah Responden Menurut Usia	58
Tabel 4.4	Jumlah Responden Menurut Pendidikan Terakhir	59
Tabel 4.5	Jumlah Responden Menurut Jabatan.....	59
Tabel 4.6	Jumlah Responden Menurut Golongan	60
Tabel 4.7	Interpretasi Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden	61
Tabel 4.8	Jawaban Responden terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan	61
Tabel 4.9	Jawaban Responden terhadap Variabel Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.....	63
Tabel 4.10	Jawaban Responden terhadap Variabel Kebijakan Akuntansi	64
Tabel 4.11	Jawaban Responden terhadap Variabel Pengendalian Internal	65
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinieritas	72
Tabel 4.14	Hasil Pengujian Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	40
---------------------------------------	----

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
DI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH**

MULIADI QUENZALO
NPM : 1902110079

Pembimbing : 1) H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.Ak
2) Ibu Elviza, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua SKPA di Pemerintah Aceh yang berjumlah 48 SKPA. Penelitian ini dilakukan pada bagian penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPA di lingkungan kerja Pemerintah Aceh. Penelitian memilih Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara pada setiap SKPA. Jumlah sampel seluruhnya adalah 144 orang. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), Kebijakan akuntansi (X_2) dan pengendalian internal (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan, kebijakan akuntansi (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual, Kebijakan akuntansi, pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan

**THE EFFECT OF THE APPLICATION OF ACCRUAL-BASED
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, ACCOUNTING POLICIES
AND INTERNAL CONTROLS ON THE QUALITY OF FINANCIAL
REPORTING IN ACEH'S WORK UNITS**

MULIADI OUENZALO
NPM : 1902110079

Advisor: 1) H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.Ak
 2) Ibu Elviza, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the application of accrual-based government accounting standards, accounting policies and internal control on the quality of financial reporting in the Aceh Government Work Unit. This research is classified as quantitative research. The population used in this study were all SKPAs in the Aceh Government, totaling 48 SKPAs. This research was conducted in the financial administration section of each SKPA in the Aceh Government work environment. The study selected the Financial Administration Officer (PPK) and Treasurer at each SKPA. The total sample size was 144 people. The data was processed using multiple regression analysis. The results showed that the effect of the application of accrual-based government accounting standards (X1), accounting policies (X2) and internal control (X3) simultaneously affected the quality of financial statements, the application of accrual-based government accounting standards (X1) partially affected the quality of financial statements, accounting policies (X2) partially affected the quality of financial statements and internal control (X3) partially affected the quality of financial statements.

Keywords: *Accrual-based government accounting standards, accounting policies, internal control and the quality of financial statements.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan media sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, perubahan laporan keuangan dari basis kas ke basis akrual memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi para penggunanya. Untuk itu pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Provinsi Aceh sudah menerapkan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Yusriwati & Susanti, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi, salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "ketentuan mengenai pengakuan dan

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas (Setiawan & Gayatri, 2017).

Penerapan akuntansi berbasis akrual harus diterapkan secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual baru diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, kondisi diatas bagaimanapun akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, bagi kalangan yang baru menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual, peralihan ini menuntut waktu untuk memahaminya (Aziyah & Yanto, 2022).

Bukti tentang manfaat yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, sementara akademisi telah meremehkan pentingnya akuntansi akrual di sektor publik. Namun, banyak penelitian telah menganjurkan superioritas akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas sehingga alasan mengapa banyak organisasi sektor publik internasional telah mengadopsi atau sedang dalam proses menerapkan prinsip akuntansi akrual (Rahmawati, 2016).

Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian Dirjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi menyatakan bahwa hambatan yang akan dialami adalah sulitnya pola pikir staf atau pejabat pengelola

keuangan, kerumitan, dan beragamnya transaksi keuangan yang dicatat secara akrual, jumlah tenaga pelatih di pemerintahan yang mampu mendidik akuntansi akrual terbatas serta membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk mengembangkan sistem yang handal (Holle, 2019).

Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menerapkan sistem berbasis akrual, Pemerintah Provinsi Aceh menggelar bimbingan dan okakarya pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sehingga Pemerintah Provinsi Aceh dapat mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual disamping itu pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan cara pengimputan data berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Manfaat utama akuntansi akrual meliputi, kinerja yang lebih baik, komparabilitas, proses pengambilan keputusan yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih baik dan pengendalian yang lebih efisien. Akuntansi akrual membantu memperbaiki keputusan manajer, memberikan biaya dan aktivitas layanan yang lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas manajer (Holle, 2019).

Aakuntansi keuangan adalah teknik keuangan akuntan secara alami telah mendapat perhatian oleh fungsi pelayanan khusus. Laporan keuangan menghasilkan gambaran penelitian yang dipercaya. Bagaimana penelitian itu bekerja dalam setahun, dan dalam bentuk apa penelitian itu berlangsung sekarang. Tekanan selalu menuai pertanyaan mengenai penghasilan dan pengeluaran, neraca dan arus kas nantinya. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh

data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Safitri, 2017).

Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan macam opini yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer atau TMP). Ketika Badan pemeriksa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hikma, (2020), menarik kesimpulan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Aceh merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan masih banyak temuan-temuan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Aceh pada saat pelaksanaan audit laporan keuangan. Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPA tahun 2020, yaitu saldo Investasi Non-Permanen, berupa Dana PER

sebesar Rp 40.68 miliar belum didukung dengan laporan berkala perkembangan realisasi dan pengembalian dana dari bank-bank pengelola dan Dana Bergulir sebesar Rp 42,25 miliar tidak didukung dengan data penerima dan laporan perkembangan dana. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai investasi non-permanen tidak dapat disajikan sesuai metode *Net Realizable value*. (<https://aceh.bpk.go.id/lkpd-provinsi-aceh/>).

Aset Tetap yang disajikan tidak berdasarkan data pendukung mutasi aset tetap, dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) masing-masing SKPA masih tercatat aset tetap yang bernilai Rp 0,00 sebanyak 152 unit, aset tetap bernilai Rp 1,00 sebanyak 22 unit, aset tetap yang nilainya tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap dan aset tetap yang merupakan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat/kabupaten/kota. (Badan Pengelola Keuangan Aceh)

Penyajian dana cadangan dalam laporan keuangan tidak memenuhi karakteristik sebagai akun dana cadangan sebagaimana diatur dalam SAP karena tidak diketahui tujuan pembentukan, jangka waktu dan belum ditetapkan dengan qanun. (Badan Pengelola Keuangan Aceh). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Aceh telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak tahun 2015 sampai 2020. Sementara itu LKPA tahun pelaporan dibawah 2015 masih peroleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu mengindikasikan bahwa laporan keuangan Provinsi Aceh mempunyai beberapa permasalahan. Opini WTP tidak serta merta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ataupun kualitas keuangan sudah

baik. Ada beberapa masalah yang harus ditindaklanjuti yang tertuang didalam catatan khusus. Diantaranya adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Masih banyak aset-aset bekas Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Aceh untuk di distribusikan ke kabupaten kota belum selesai (Badan Pemeriksa Keuangan RI).

Kualitas pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan dan pemahaman SAP dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu indikator pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan dan pemahaman SAP berbasis Akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping memberikan rekomendasi lainnya.

Sebagai salah satu entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Aceh juga mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hubungan keterkaitan antar variabel yang diteliti oleh penulis adalah bahwa sesuai dengan hasil yang telah diteliti sebelumnya bahwa ada keterkaitan antar variabel independen terhadap variabel dependen yaitu bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, Kebijakan Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas

pelaporan keuangan dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas Pelaporan Keuangan.

Untuk itulah penulis ingin menyusun skripsi ini dengan berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besarkah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kebijakan akuntansi dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
2. Seberapa besarkah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
3. Seberapa besarkah pengaruh kebijakan akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
4. Seberapa besarkah pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan di satuan kerja perangkat Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah maka perlu disusun tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kebijakan akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
2. Menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
3. Menganalisis kebijakan akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
4. Menganalisis pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan, khususnya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Aceh untuk mengetahui arti pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.
3. Bagi penelitian mendatang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, dibatasi pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Dalam laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Suharti & Rumsari, 2021)

Terdapat ada 4 (empat) karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Menurut Mardiasmo, (2016) , pola pertanggungjawaban pemerintah daerah saat ini lebih bersifat horizontal (pemerintah daerah bertanggungjawab kepada DPRD maupun pada masyarakat). Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan dan materialistik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi 17 anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Menurut PSAK No. 1 (2015:1) laporan keuangan adalah Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatuentitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Simanjuntak, 2015).

Laporan keuangan adalah Laporan keuangan dapat diibaratkan sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang sedang melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir dengan cara yang tepat dan tidak tersesat ditengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Taufiqurrohman et al., 2021).

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

McDaniel et., al (2002), menyatakan untuk menilai kualitas laporan keuangan menggunakan tiga karakteristik yaitu relevance, reliability dan comparability. Ferdy van Beest, et. al (2009) menulis artikel dengan judul *Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics*. Dalam artikel dinyatakan mereka membangun sebuah alat ukur komprehensif untuk menilai kualitas pelaporan keuangan dalam hal karakteristik kualitatif yang mendasar (misalnya relevan) dan meningkatkan karakteristik kualitatif (*understandability, comparability, dan verifiability*) seperti yang didefinisikan dalam Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan dari FASB (2008).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Komitmen Organisasi; Robbins dan Judge (2008) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya

dalam organisasi. Kompetensi Sumber daya manusia; Menurut Bastian (2006) bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai SAP.

Betapapun bagusnya SAP, tanpa didukung SDM yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Pemanfaatan Teknologi Informasi; Menurut Junali dan Supomo (2022) pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Efektivitas Pengendalian Internal; Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Erlina and Rasdianto, (2015) yang terkait kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- c. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
- b. Dapat Diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Rahmawati, 2016).

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Menurut Holle, (2019), sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan Selandia Baru menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan

informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. Pada dasarnya, akuntansi berbasis akrual mengharuskan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya suatu peristiwa akuntansi, transaksi ekonomi atau sebutan lainnya dari peristiwa akuntansi ketika diduga telah ada implikasi yang dapat mempengaruhi kas pada saat ada penambahan atau pengurangan kas. Adapun tujuan penerapan akuntansi akrual dalam akuntansi sektor publik menurut Mahmudi (2010:63), untuk menentukan *cost of service* dan *charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Faktor keempat yang juga mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah komunikasi. Menurut Edwar dalam Safitri, (2017) ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan. Putri and Agustawan, (2020) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut. Namun dalam penelitian menyatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2.2.3 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Adapun indikator dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut (Rasyid, 2019):

1. Pengakuan Menurut PP No 71 Tahun 2010, Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait

2. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
3. Pelaporan. pelaporan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pemakai, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya.
4. Pengungkapan Pengungkapan menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berhubungan dengan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting danbermanfaat selain apa yang dinyatakan melalui laporan keuangan.

2.3 Kebijakan Akuntansi

2.3.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Menurut PKAK (2015:46) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan Bank Indonesia dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dari uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan dan praktik yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Simanjuntak, 2015).

Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

1. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar.
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi.
3. Pengguna laporan keuangan dalam memberikan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi.

Faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam bentuk kerangka kebijakan akuntansi hanyalah salah satu informasi keuangan bagi individu. Keputusan mengenai kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan sumber-sumber alternatif diluar akuntansi yang menyajikan informasi yang tersedia secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan dan investor. Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus pada para pemakai informasi keuangan.

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Akuntansi

Standar dan pernyataan atau ketentuan lainnya yang dihasilkan oleh organisasi pembuat kebijakan akan diintegrasikan dan diterapkan dalam praktek pada tingkat organisasi. Kemudian sebelum laporan keuangan dihasilkan, auditor akan menjelaskan fungsinya sebagai fungsi pengendalian yaitu memastikan adanya kecocokan antara praktik akuntansi dengan berbagai ketentuan akuntansi yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan akuntansi :
(Simanjuntak, 2015)

1. Faktor Politik. Adapun yang dimaksud dengan faktor politik adalah pihak-pihak yang merupakan subjek dimana ketentuan dan berbagai regulasi dihasilkan.
2. Teori Akuntansi. Teori akuntansi dikembangkan dan disaring lewat sebuah proses riset akuntansi. Hasil riset utama berasal dari akuntan pendidik, kantor akuntan publik, dan sektor industri swasta.

2.3.3 Indikator Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Yang menjadi Indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu (Kusmardiyah, 2018):

- a. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- b. Penggolongan dan Pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.
- c. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.4 Pengendalian Internal

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi pengendalian intern menurut Erna, (2020) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian intern menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian sistem pengendalian intern menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan (Susanto, 2013).

Susanto (2013) menyebutkan bahwa tujuannya Sistem Pengendalian Internal dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengendalian Internal Akuntansi.

Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan dari kekayaan para investor dan kreditor dengan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Sebaliknya, pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan /ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Kiranayati & Erawati, 2016).

2. Pengendalian Internal Administratif. Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama efisiensi dan kepatuhan atas kebijakan pimpinan.

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian Internal

Inti dasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah terciptanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktek-praktek good governance. PP 60/2008 tentang SPIP ini sebenarnya murni mengadopsi pendekatan dari GAO yang menginduk kepada COSO. Konsep ini menekankan kepada 5 unsur pengendalian intern (Winarno dalam Wardhani & Andriyani, 2017), yakni:

1. Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*) Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian intern yang

sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik. Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern adalah:

- a. Komitmen manajemen terhadap nilai-nilai etika dan integritas (*commitment to ethical values and integrity*). Di dalam suatu perusahaan harus ditanamkan suatu etika dan nilai-nilai etika.
- b. Gaya operasional yang dipakai oleh manajemen dan filosofi yang dianut oleh manajemen (*Operating style management's and philosophy*). Pentingnya penegakan aturan beserta hukumannya harus diyakinkan oleh manajemen kepada seluruh karyawan agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai aturan.
- c. Struktur organisasi (*Organizational structure*). Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan digunakan untuk menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang baik sesuai dengan keinginan manajemen. Dalam penerapannya masing-masing bagian tidak diperbolehkan ada karyawan yang paling berkuasa dalam menangani suatu transaksi dan bagian-bagian tersebut harus bisa diawasi.
- d. Metode pembagian tanggungjawab dan tugas (*methods of assigning responsibility and authority*). Pemisahan tugas antara karyawan yang melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemberian otorisasi.
- e. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia (*human resources policies and practices*). Perusahaan harus memilih orang-orang yang kompeten dibidangnya.

- f. Pengaruh dari luar (*external influences*) yaitu adanya pengaruh-pengaruh yang timbul dari lingkungan luar perusahaan misalnya timbul dari bank maupun perusahaan asuransi.

2. Kegiatan pengawasan (*control activities*)

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Menurut COSO ada beberapa control activities yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan (*proper authorization of transactions and activities*)
- b. Pembagian tugas dan tanggungjawab (*segregation of duties*)
- c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik (*design and use of adequate documents and records*)
- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan (*adequate safeguards of assets and records*)
- e. Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan (*independent checks on performance*)

3. Pemahaman resiko (*risk assessment*)

Manajemen perusahaan harus bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:

- a. Risiko strategis yaitu mengerjakan sesuatu kegiatan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan perusahaan tidak bisa mencapai tujuannya dengan baik.

- b. Risiko finansial yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan seperti adanya pemborosan dan pencurian uang
- c. Risiko informasi yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan, informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

4. Informasi dan Komunikasi (*Communication and Information*)

Perusahaan harus mengetahui tugas masing-masing karyawan, contohnya karyawan yang mencatat transaksi penjualan, mengirim tagihan kepada pembeli dan yang menerima uang pembayaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat melacak karyawan yang cenderung untuk melakukan kecurangan.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah ketika suatu kegiatan berjalan tidak sesuai apa yang diharapkan dapat diambil tindakan secepatnya. Bentuk pemantauan di perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu (atau semua) prosedur berikut ini:

- a. Supervisi yang efektif (*effective supervision*) yaitu, melakukan pembimbingan terhadap karyawan.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) yaitu, melakukan penerapan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, departemen maupun proses yang dijalankan oleh perusahaan.
- c. Audit internal (*internal auditing*) yaitu, pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan untuk menilai sistem yang dijalankan perusahaan dan memberi laporan kepada manajemen mengenai usulan

perbaikan sehingga manajemen dapat segera meminta untuk memperbaiki sistem tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Di Satuan Perangkat Kerja Aceh. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

Putriasri Pujanira (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Kemudian hasil selanjutnya adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Kesimpulan selanjutnya yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.

Roviyantie (2012) melakukan penelitian dengan hasil kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sangat baik, kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan secara simultan pengawasan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Kiranayanti, Ida Ayu (2016) meneliti mengenai pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD Kabupaten Badung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan yang terdiri dari 108 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jati (2019) meneliti mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Metode

penelitian yang digunakan ialah metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas LKPD setelah penerapan SAP berbasis akrual.

Triwahyuni (2016) meneliti mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah Dumai. Metode penelitian yang digunakan ialah metode *purposive sampling*. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah sekretaris SKPD, bendahara SKPD, Kepala Subbagian Keuangan dan kepala administrator keuangan. sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada pemerintah daerah Kota Dumai. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Faishol (2016) meneliti mengenai pengaruh sistem, pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah Lamongan. Metode penelitian ini yang digunakan ialah metode analisis regresi linear dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Lestari & Dewi (2020) meneliti mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern

terhadap kualitas laporan keuangan. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Erna (2020) meneliti mengenai analisis implementasi kebijakan akuntansi dan kualitas laporan keuangan. Populasi dan sampel yang digunakan adalah h kondisi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktifitas, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Secara keseluruhan, Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi yang dilihat dari tiga dimensinya yaitu regulasi, sistem dan sarana pendukung dan juga sumber daya manusianya maka dapat disimpulkan bahwa seluruh SKPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Metodologi	Persamaan/ Perbedaan
1.	Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan	Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Responden dalam penelitian adalah pegawai Bagian Keuangan 15 Dinas Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Waktu	Persamaan: meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

		Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel penerapan sistem Akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	penelitian pada bulan April 2017.	Perbedaan: penelitian terdahulu mengambil lokasi penelitian pada Provinsi DIY, sedangkan penelitian ini pada provinsi Aceh.
2.	Devi Roviyantje (2012)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Variabel sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Objek dalam penelitian adalah berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas yaitu pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. SKPD	Persamaan: meneliti kualitas laporan keuangan daerah Perbedaan: terdapat beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya adanya pada perbedaan beberapa variabel independen yang diteliti.

No	Nama	Judul	Variabel	Metodologi	Persamaan/ Perbedaan
3.	Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Variabel pemahaman basis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Salatiga. Sampel penelitian ini adalah 3 pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Salatiga. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sampling diambil berdasarkan kuesioner yang dikembalikan oleh responden.	Persamaan: meneliti sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan: penelitian terdahulu meneliti pemahaman berbasis akruaI, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI.
4.	Budhi Purwanto Jati (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia.	Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.	Persamaan: meneliti penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan: penelitian terdahulu meneliti pada seluruh pemerintah di Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti pada SKPA Aceh.

No	Nama	Judul	Variabel	Metodologi	Persamaan/ Perbedaan
5.	Mustika Triwahyuni (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)	1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai. 2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai. 3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Dumai yang berjumlah 19 SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan pada SKPD Kota Dumai, dari setiap SKPD diambil 4 responden yaitu Sekretaris, Bendahara, Kasubbag Keuangan dan Staff Keuangan.	Persamaan: meneliti mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan: terdapat beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya adanya pada perbedaan beberapa variabel independen yang diteliti.
6.	Ahmad Faishol (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)	Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. System pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas penyajian laporan keuangan yang belum diteliti.	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Lamongan yang berjumlah 15 SKPD. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier	Persamaan: meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan: terdapat perbedaan pada objek penelitian.

No	Nama	Judul	Variabel	Metodologi	Persamaan/ Perbedaan
7.	Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,000. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,000. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.	Persamaan: meneliti mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan: terdapat beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya adanya perbedaan beberapa variabel independen yang diteliti
9.	Erna (2020)	Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Implementasi kebijakan Akuntansi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi.	Populasi dan sampel yang digunakan adalah kondisi social yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktifitas, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini	Persamaan: meneliti mengenai kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan: terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya perbedaan variabel dan objek yang diteliti.

				regulasi, sistem dan sarana pendukung dan juga sumber daya manusianya maka dapat disimpulkan bahwa seluruh SKPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah (2022)

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa norma pembukuan pemerintah berbasis akrual adalah pedoman pembukuan pemerintah yang memandang pendapatan, biaya, sumber daya, kewajiban, dan nilai dalam pengungkapan keuangan berbasis akrual, serta memandang pendapatan, konsumsi, dan pembiayaan dalam mengumumkan pelaksanaan rencana pengeluaran dengan memperhatikan dasar pemikiran yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Hasil penelitian terdahulu oleh Triwahyuni (2016) menyatakan bahwa variabel penggunaan norma pembukuan pemerintah mempengaruhi variabel sifat laporan moneter pemerintah di sekitarnya. Penelitian lain Holle (2019) faktor pedoman pembukuan pemerintah mempengaruhi sifat variabel laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam eksplorasi lain, secara spesifik yang diarahkan oleh Natalia Christanti (2013) pembukuan berbasis pengumpulan pada dasarnya mempengaruhi sifat laporan fiskal. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahayu (2020) bahwa kerangka kerja pembukuan pemerintah berbasis akrual secara signifikan mempengaruhi sifat ringkasan anggaran. Agustiawan, N, T. dan

Rasmini, N (2016) dengan hasil bahwa penggunaan kerangka kerja pembukuan berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap sifat laporan fiskal.

2.6.2 Pengaruh Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Pertimbangan mengenai strategi pembukuan semakin meluas dengan alasan bahwa strategi ini memberikan pendekatan untuk mengkoordinasikan pergerakan moneter, terutama dalam hal data moneter. Tujuan memilih strategi pembukuan yang paling sesuai akan menggambarkan kebenaran moneter pemerintah secara definitif sebagai keadaan moneter dan hasil kerja, hal ini diakui untuk bantuan pemerintah daerah setempat melalui administrasi yang unggul, penguatan, dan dukungan daerah setempat. Jadi, pertimbangan utama untuk memahami hal ini adalah pengenalan laporan moneter yang tepat dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara umum dan sifat ringkasan fiskal teritorial itu sendiri. Untuk mengetahui konsekuensi asli dari sifat ringkasan fiskal daerah itu sendiri, diperoleh dengan melihat dampaknya pada pengaturan pembukuan laporan anggaran.

Hal ini sesuai dengan penelitian Firdaus; Nadirsyah; Heru Fahlevi (2015) yang melihat dampak dari sifat SDM, pemanfaatan inovasi data dan penggunaan pendekatan pembukuan terhadap sifat laporan fiskal. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa sifat SDM, pemanfaatan inovasi data dan pemanfaatan strategi pembukuan secara bersama-sama berpengaruh terhadap sifat laporan keuangan Pemerintah Daerah Banda Aceh.

Erna (2020) memeriksa pemeriksaan pelaksanaan strategi pembukuan dan sifat ringkasan fiskal. Hasil akhir dari penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan Norma

Pembukuan Pemerintah. Secara umum, sifat ikhtisar fiskal pada Organisasi Solidaritas Masyarakat dan Politik Sukabumi memiliki kualitas yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari atribut subjektif ikhtisar fiskal Bangkesbangpol yaitu dapat diterapkan, andal, dapat dibandingkan, dan wajar.

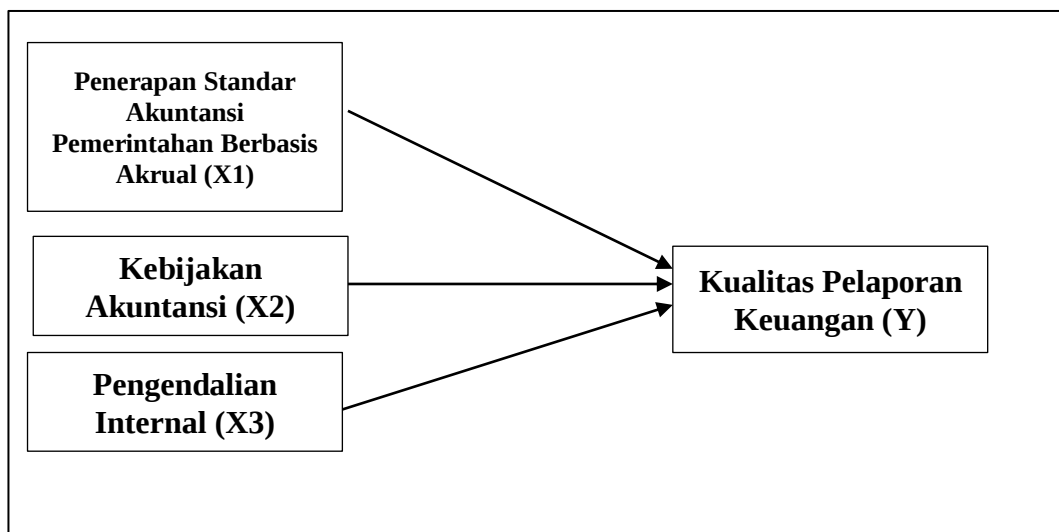
2.3.3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Pengendalian ke dalam adalah metode untuk mengkoordinasikan, mengelola, dan mengukur aset suatu asosiasi, dan mengasumsikan bagian yang signifikan dalam penanggulangan dan pengakuan salah saji. Pengendalian internal terdiri dari strategi dan sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menjamin atau memberikan data moneter yang solid, serta menjamin konsistensi dengan peraturan dan pedoman yang terkait. Pada tingkat hirarkis, target pengendalian internal terkait dengan ketergantungan laporan anggaran, masukan yang tepat untuk pencapaian tujuan fungsional dan vital, serta konsistensi dengan peraturan dan pedoman (Armel, 2017).

Konsekuensi dari pengujian kerangka pengendalian intern Benny (2022) dapat beralasan bahwa variabel kerangka pengendalian intern otoritas publik secara keseluruhan mempengaruhi variabel sifat laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Holle (2019) dapat beralasan bahwa variabel Kerangka Pengendalian Intern mempengaruhi sifat variabel laporan keuangan pemerintah daerah. Akibatnya, spekulasi selanjutnya dapat diterima, karena variabel Kerangka Pengendalian Intern pada dasarnya mempengaruhi sifat laporan keuangan pemerintah.

Dalam hasil penelitian lain yang dipimpin oleh Sukmaningrum (2012), secara tepat menunjukkan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah secara

signifikan mempengaruhi sifat data laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi dari hasil pengujian Susilawati dan Riana (2014), kerangka pengendalian ke dalam pada saat yang sama secara fundamental mempengaruhi sifat laporan keuangan pemerintah daerah. Munasyir (2015) dengan hasil bahwa kerangka pengendalian intern pada dasarnya berpengaruh terhadap sifat laporan keuangan. Natalia Christanti (2013) konsekuensi dari eksplorasinya menemukan bahwa kerangka pengendalian internal secara keseluruhan mempengaruhi sifat ringkasan fiskal. Jumiartini (2015) menemukan bahwa kerangka pengendalian intern otoritas publik mempengaruhi sifat laporan keuangan. Kiranayanti, Ida Ayu (2016), dengan hasil bahwa kerangka pengendalian intern berpengaruh terhadap sifat laporan anggaran..



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Aceh.

H₂: Standar Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

H₃: Kebijakan Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

H₄: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan langkah yang harus dilakukan untuk sebuah penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah solusi. Desain penelitian memiliki minimal 6 (enam) aspek, diantaranya adalah :

1) Tujuan studi

Suatu studi mungkin dapat bersifat eksploratif, deskriptif, dan pengujian hipotesis. Sifat studi tersebut bergantung pada tahap peningkatan pengetahuan mengenai topik yang diteliti.

2) Jenis investigasi

Menentukan jenis studi apakah yang diperlukan yaitu studi kausal (hubungan sebab akibat) atau studi korelasional (hubungan dengan).

3) Intervensi peneliti

Intervensi peneliti merupakan tingkat manipulasi dan kontrol peneliti terhadap studi yang dilakukan baik studi kausal ataupun korelasional. Tingkat intervensi peneliti terdiri dari 3 (tiga) yaitu lemah, sedang dan berlebih.

4) Situasi studi

Situasi studi merupakan gambaran lingkungan suatu penelitian apakah dalam situasi diatur atau pun tidak diatur dalam keadaan artificial dan diatur.

5) Unit analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam hal ini unit analisis yang dimaksud terdiri dari unit analisis individual, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan.

6) Horizon waktu

Horizon waktu merupakan aspek temporal suatu studi dalam mengumpulkan data yang terdiri dari studi *cross sectional* yaitu pengumpulan data hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian sedangkan studi longitudinal pengumpulan data lebih dari batas waktu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka desain penelitian dalam pelaksanaan studi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tujuan studi

Tujuan studi dalam penelitian ini bersifat pengujian hipotesis yang mana telah dikembangkan berdasarkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Aceh

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan sebab akibat. Peneliti ingin menemukan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi pemerintahan

Berbasis Akruar, Kebijakan Akuntansi dan Pengendalian Internal, sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan.

3) Tingkat Intervensi Peneliti

Dalam studi peneliti tidak bermaksud untuk melakukan intervensi dan manipulasi data untuk mempengaruhi hasil. Tingkat intervensi penelitian ini adalah minimal.

4) Situasi Studi

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini diperlukan data dari lingkungan yang sebenarnya pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur.

5) Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh.

6) Horizon waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *Cross Section* dimana setiap periode pengamatan selalu memiliki jumlah unit analisis yang sama.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua SKPA di Pemerintah Aceh yang berjumlah 48 SKPA. Penelitian ini dilakukan pada bagian penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPA di lingkungan kerja Pemerintah Aceh. Penelitian memilih Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara pada setiap SKPA. Penentuan objek responden tersebut di dasari oleh proses pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPA yang bersumber

dari bendahara SKPA dan PPK selaku pembuat laporan keuangan SKPA. Pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan penentuan-penentuan dari tertentu dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari sasaran spesifik.

3.2.2 Sampel

Tabel 3.1 Populasi/Responden Penelitian

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Sampel
1.	Badan Arsip dan Perpustakaan	3
2.	Badan Investasi dan Promosi	3
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	3
4.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	3
5.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	3
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3
7.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
8.	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah	3
9.	Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh	3
10.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	3
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
12.	Dinas Bina Marga	3
13.	Dinas Cipta Karya	3
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
15.	Dinas Kehutanan	3
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
17.	Dinas Kesehatan	3
18.	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan	3
19.	Dinas Keuangan Aceh	3
20.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3
22.	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	3
23.	Dinas Pendidikan	3
24.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3
25.	Dinas Pengairan	3
26.	Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telekomunikasi	3
27.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3
28.	Dinas Perkebunan	3
29.	Dinas Pembangunan dan Energi	3
30.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	3
31.	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	3
32.	Dinas Sosial	3

33.	Dinas Syariat Islam	3
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	3
35.	Inspektorat Aceh	3
36.	Kantor Perhubungan Pemerintah Aceh/Jakarta	3
37.	Komisi Pemilihan Umum Aceh	3
38.	Rumah Sakit Jiwa	3
39.	RSU dr. Zainal Abidin	3
40.	Satuan Polisi Pamoeng Praja dan Wilayatul Hisbah	3
41.	Sekretariat Baitul Mal	3
42.	Sekretariat Daerah	3
43.	Sekretariat DPP Korpri Aceh	3
44.	Sekretariat DPRA	3
45.	Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	3
46.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3
47.	Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah	3
48.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3
Jumlah Responden		144

Sumber: LHP Kabupaten Aceh Besar (2020)

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Pengumpulan Data

Didalam suatu penelitian, data merupakan unsur yang sangat penting. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti terdahulu, yang diterbitkan, dan tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti sekarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil jawaban melalui kuesioner yang diajukan oleh peneliti.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kualitas pelaporan keuangan, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X1), kebijakan akuntansi (X2), dan pengendalian internal (X3).

Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk penyusunan kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)	Penyajian informasi dalam laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.	• Relevan • Andal • Dapat dibandingkan • Dapat dipahami (Permendagri Nomor 71b Tahun 2010)	• A1-A3 • A4-A6 • A7-A9 • A10-A12
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X1)	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual	• Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas • Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan • Penyajian secara wajar (Permendagri Nomor 71 Tahun 2010)	• B1-B2 • B3-B4 • B5-B7

Kebijakan Akuntansi (X2)	“Kebijakan akuntansi merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan bagi pengguna Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas”(Erna,2020).	• Pengakuan pendapatan dan belanja • Pengakuan aset • Pengakuan kewajiban (Simanjuntak, 2015).	• C1-C3 • C4-C7 • C8-C11
Pengendalian Internal (X3)	Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	• Lingkungan pengendalian • Penilaian resiko • Aktivitas pengendalian • Informasi dan komunikasi • Pemantauan (COSO,1992)	• D1-D2 • D3-D4 • D5-D6 • D7-D8 • D9-D10

Sumber: Data diolah (2022)

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti data yang diperoleh dari responden. Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan. Adapun metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen. Data diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) berdasarkan jawaban dari responden.

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk memprediksi hubungan variabel dependen dengan variabel independen dari nilai koefisien yang mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Sugiyono, 2017).

$$\text{Persamaan} \quad Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kualitas Pelaporan Keuangan
X1	=	Penerapan SAP Berbasis Akrua
X2	=	Kebijakan Akuntansi
X3	=	Pengendalian Internal
a	=	Constanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	<i>Regression Coefficient</i>
e	=	Standar Error

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka akan dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan maka dilakukan pengujian secara statistik

3.6 Pengujian Data

3.6.1. Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai instrument. Suatu instrument dikatakan valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Ghozali, 2016:23).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sesuatu kuesioner. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r tiap butir lebih besar dari r dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan uji satu sisi, taraf signifikan 5% dengan $df = n-2$.

Pengukuran validitas dilakukan dengan rumus Product Moment Pearson (Ghozali, 2016:23).

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (Sugiyono, 2016:42).

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sesuatu konstrukstur atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha Cronbach ≥ 0.60 (Ghozali, 2016:23).

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi linier berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik.

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016:23). Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah (Ghozali, 2016:23):

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, jika menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolineritas

Multikolineritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi linier berganda. Model regresi yang dimaksud dalam hal ini antara lain: regresi linear, regresi logistik, regresi data panel dan *cox regression*. Cara mendeteksi adanya Multikolineritas di dalam model regresi adalah dengan cara:

1. Melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Jika ada korelasi antar variabel bebas $> 0,8$ dapat diindikasikan adanya multikolineritas.
2. Melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error > 1 , maka dapat diindikasikan adanya multikolineritas.
3. Melihat rentang *confidence interval*. Jika rentang *confidence interval* sangat lebar, maka dapat diindikasikan adanya multikolineritas.
4. Melihat nilai *Condition Index dan eigenvalue*. Jika nilai condition index > 30 dan nilai eigenvalue $< 0,001$ dapat diindikasikan adanya multikolineritas.

5. Melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflating Factor* (VIF). Jika nilai Tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Sebagian pakar menggunakan batasan Tolerance $< 0,2$ dan VIF > 5 dalam menentukan adanya multikolinearitas. Para pakar juga lebih banyak menggunakan nilai Tolerance dan VIF dalam menentukan adanya Multikolinearitas.

3. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:23).

Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di studentized (Ghozali, 2016:23). Adapun dasar atau kriteria pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah (Ghozali, 2016:23):

- a. Jika terdapat pola tertentu yaitu jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu jika titik-titiknya menyebar, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel
- b. independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel
- d. Independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 ditolak dan H_a diterima jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k = 0$ yang artinya adalah apakah semua variabel

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

- a. Jika tingkat signifikansi $F > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.
- b. Jika tingkat signifikansi $F < 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika Koefisien Determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y, dimana $0 < R^2 < 1$, sebaliknya jika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini *R Square* yang digunakan adalah *R Square* yang sudah disesuaikan atau *adjusted R Square (Adjusted R^2)* dengan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R^2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Variabel Penelitian

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan menggunakan *google form* baik secara langsung atau melalui komunitas responden yang dilakukan pada tanggal 28-31 Januari 2023.

Penelitian ini dilakukan dengan sampel sebanyak 96 responden. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara pada setiap SKPA. Penentuan objek responden tersebut di dasari oleh proses pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPA yang bersumber dari bendahara SKPA dan PPK selaku pembuat laporan keuangan SKPA. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kebijakan akuntansi dan pengendalian internal sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan keuangan. Perhitungan statistik deskriptif pada penelitian ini terdiri dari: jumlah data (N), rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi untuk masing-masing variabel. Data statistik tersebut tersaji pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	144	3,33	5,00	4,32	0,39
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X ₁)	144	2,57	5,00	3,74	0,58
Kebijakan akuntansi (X ₂)	144	3,18	4,82	4,20	0,36
Pengendalian Internal (X ₃)	144	3,20	5,00	4,10	0,46

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X₁) memiliki nilai terendah sebesar 2,57 dan nilai tertinggi sebesar 5,00 nilai rata-ratanya sebesar 3,74 dan standar deviasi sebesar 0,587. Variabel ukuran kebijakan akuntansi (X₂) memiliki nilai terendah sebesar 3,18 dan nilai tertinggi sebesar 4,82 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,20 dan standar deviasi sebesar 0,36. Variabel Pengendalian Internal (X₃) memiliki nilai terendah sebesar 3,20 dan nilai tertinggi sebesar 5,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,10 dan standar deviasi sebesar 0,46. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai terendah sebesar 3,33 dan nilai tertinggi sebesar 5,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,32 dan standar deviasi sebesar 0,39.

4.1.2 Karakteristik Responden

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui kuisisioner sebagai alat penelitian yang diberikan kepada sampel. Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik responden.

4.1.2.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

Penggolongan komposisi jenis kelamin diklasifikasikan berdasarkan 2 bagian yaitu (1) laki-laki dan (2) perempuan. Untuk melihat secara rinci data karakteristik responden menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	97	67,4
2	Perempuan	47	32,6
	Jumlah	144	100

Sumber: Data primer yang diolah, (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa dari karakteristik jenis kelamin diketahui bahwa 97 orang (67,4%) responden berjenis kelamin laki-laki dan 47 orang lainnya (32,6%) berjenis kelamin perempuan.

4.1.2.2 Responden Menurut Usia

Penggolongan komposisi usia diklasifikasikan berdasarkan 3 bagian yaitu (1) ≤ 30 tahun, mulai 31-40 tahun dan (3) mulai 41-50 tahun. Untuk melihat secara rinci data karakteristik responden menurut usia disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Responden Menurut Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	≤ 30 Tahun	6	4,2
2	31-40 tahun	99	68,8
3	41-50 tahun	39	27,1
	Jumlah	144	100

Sumber: Data primer yang diolah, (2023)

Tabel 4.3 menjelaskan bawah usia responden terbanyak adalah yang berusia antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 99 orang atau 68,8%, diikuti usia 41-50 tahun sebanyak 39 orang atau 27,1% dan usia ≤ 30 Tahun sebanyak 6 orang atau 4,2%.

Hal ini menunjukkan bahwa yang mengisi kuisioner yang diedarkan lebih banyak responden yang berusia antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 68,8%.

4.1.2.3 Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Penggolongan komposisi usia diklasifikasikan berdasarkan 2 bagian yaitu (1) Sarjana dan (2) Magister. Untuk melihat secara rinci data karakteristik responden menurut Pendidikan Terakhir disajikan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	98	68,1
2	Magister	46	31,9
	Jumlah	144	100

Sumber: Data primer yang diolah, (2023)

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah Sarjana sebanyak 98 orang atau 68,1% dan Magister sebanyak 46 orang atau 31,9% . Hal ini menunjukkan bahwa yang mengisi kuesioner yang diedarkan penulis lebih banyak responden yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu 98 orang atau 68,1% dari total jumlah responden.

4.1.2.4 Responden Menurut Jabatan

Penggolongan komposisi usia diklasifikasikan berdasarkan 4 bagian yaitu (1) PPK, (2) Kasubbang Keuangan, (3) Bendahara dan (4) Staf Bagian Keuangan. Untuk melihat secara rinci data karakteristik responden menurut Jabatan disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jumlah Responden Menurut Jabatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	PPK	31	21,5
2	Kasubbag Keuangan	54	37,5

3	Bendahara	39	27,1
4	Staf Bagian Keuangan	20	13,9
	Jumlah	144	100

Sumber: Data primer yang diolah, (2023)

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa jabatan responden terbanyak adalah Kasubbag Keuangan sebanyak 54 orang atau 37,5%, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebanyak 31 orang atau 21,5 %, kemudian Bendahara sebanyak 39 orang atau 27,1% dan Staf Bagian Keuangan sebanyak 20 orang atau 13,9% . Hal ini menunjukkan bahwa yang mengisi kuesioner yang diedarkan penulis lebih banyak responden dengan jabatan Kasubbag Keuangan sebanyak 54 orang atau 37,5% dari jumlah keseluruhan responden.

4.1.2.5 Responden Menurut Golongan

Penggolongan komposisi menurut golongan diklasifikasikan berdasarkan 3 bagian yaitu (1) Golongan II (2) Golongan III dan (3) Golongan IV. Untuk melihat secara rinci data karakteristik responden menurut golongan disajikan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Jumlah Responden Menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Golongan II	7	4,9
2	Golongan III	87	60,4
3	Golongan IV	50	34,7
	Jumlah	144	100

Sumber: Data primer yang diolah, (2023)

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa responden menurut golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 87 orang atau 60,4% , Golongan IV sebanyak 50 orang atau 34,7%, dan golongan II sebanyak 7 orang atau 4,9% . Hal ini

menunjukkan bahwa yang mengisi kuesioner yang diedarkan penulis lebih banyak responden dengan golongan III sebanyak 87 orang atau 60,4% dari jumlah keseluruhan responden.

4.1.3 Jawaban Responden terhadap Variabel Kinerja SKPD

Responden yang berjumlah 144 orang dianalisis untuk melihat jumlah (frekuensi) atas jawaban yang diberikan. Dari pertanyaan yang diajukan diperoleh skor rata-rata (mean) untuk masing-masing variabel dan dapat diinterpretasikan berdasarkan panjang kelas sebagaimana dikemukakan (Sudjana, 2005:47).

Interpretasi nilai rata-rata tanggapan responden dapat dilihat dalam Tabel 4.7

Tabel 4.7 Interpretasi Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden

Nilai	Keterangan
1,00 – 1,79	Sangat tidak setuju
1,80 – 2,59	Tidak setuju
2,60 – 3,39	Kurang setuju
3,40 – 4,19	Setuju
4,20 – 5,00	Sangat Setuju

Sumber: Sudjana (2005:47)

Jawaban responden terhadap masing-masing item pernyataan SKPD dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Jawaban Responden terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Rata-rata
1.	Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	0	10	4	35	47	4,2
2.	Laporan keuangan disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini.	0	3	5	61	27	4,2

3.	SKPA telah bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.	0	0	0	59	37	4,4
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya	0	0	4	43	49	4,5
5	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material	0	0	2	51	43	4,4
6	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	0	0	6	41	49	4,4
7	Informasi keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	0	0	4	56	36	4,3
8	Penyusunan laporan keuangan telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.	1	7	3	39	46	4,3
9	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun	0	5	10	57	24	4,0
10	Informasi keuangan yang harus dapat dipahami oleh pengguna	0	1	0	58	37	4,4
11	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna	0	3	2	44	47	4,4
12	Laporan Keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti	0	0	3	58	35	4,3
	Rerata						4,4

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan memperoleh hasil 4,4 yang artinya bahwa rata-rata jawaban responden adalah sangat setuju yang artinya bahwa kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Aceh sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Tabel 4.9 Jawaban Responden terhadap Variabel Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

No	Pernyataan	Skor Pilihan Pernyataan					Rata-rata
		1	2	3	4	5	
1	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi	0	31	10	25	30	3,6
2.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto	0	25	10	16	45	3,8
3.	Saya selalu menerapkan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi	0	28	10	28	30	3,6
4	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dan aktivitas operasi	0	25	10	16	45	3,8
5	Saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan	0	34	13	16	33	3,5
6	Saya selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi	0	23	20	12	41	3,7
7	Saya selalu menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas	0	16	9	6	65	4,3
	Rerata						3.6

Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk variabel penerapan standar akuntansi berbasis akrual memperoleh hasil 3.6 yang artinya bahwa rata-rata jawaban responden adalah

setuju yang artinya bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Aceh sudah diterapkan dengan baik.

Tabel 4.10 Jawaban Responden terhadap Variabel Kebijakan Akuntansi

No	Pernyataan	Skor Pilihan Pernyataan					Rata-rata
		1	2	3	4	5	
1	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan penerimaan sesuai dengan PSAP No. 2	2	3	4	49	38	4,2
2.	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan belanja sesuai dengan PSAP No. 2	0	2	4	63	27	4,2
3.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto	0	5	8	56	27	4,1
4	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan Asset sesuai dengan PSAP No. 7	1	4	8	63	20	4,0
5	Kebijakan akuntansi telah mengklasifikasikan Asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas	1	1	4	54	36	4,3
6	Hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi diakui dan di catat dalam persediaan	1	2	7	58	28	4,1
7	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas	0	0	4	50	42	4,4
8	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan kewajiban sesuai dengan PSAP	0	2	1	53	40	4,4
9	Kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau diakui pada saat kewajiban timbul	0	2	11	58	25	4,1
10	Kewajiban dicatat sesuai dengan nilai nominal.	0	2	6	63	25	4,2
11	Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan diakui kewajiban pada saat kewajibannya timbul	0	3	4	50	39	4,3
	Rerata						4.2

Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk variabel kebijakan akuntansi memperoleh hasil 4.2 yang artinya bahwa rata-rata jawaban responden adalah sangat setuju yang

artinya bahwa kebijakan akuntansi yang ada pada Pemerintah Aceh sudah mengakomodir semua kebutuhan SKPA dengan sangat baik.

Tabel 4.11 Jawaban Responden terhadap Variabel Pengendalian Internal

No	Pernyataan	Skor Pilihan Pernyataan				5	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten	0	2	11	53	30	4,2
2.	SKPA memiliki struktur organisasi yang jelas mengenai seluruh fungsi yang ada dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab	0	6	22	46	22	3,9
3.	Pimpinan tempat saya bekerja telah melakukan analisis secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap pelaporan keuangan	17	28	8	24	19	3,0
4	Pimpinan tempat saya bekerja selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap pelaporan keuangan	4	31	14	23	24	3,3
5	Pimpinan tempat saya bekerja telah melakukan analisis secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya risiko pelanggaran terhadap pelaporan keuangan	0	0	7	55	34	4,3
6	Aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja	1	0	3	39	53	4,5
7	Informasi keuangan dan anggaran yang memadai sudah disediakan guna mendukung penyusunan laporan keuangan pada SKPA	1	4	11	49	31	4,1
8	Setiap pegawai SKPA tempat saya bekerja mempunyai saluran komunikasi yang baik terhadap atasan langsung baik formal maupun non formal	1	4	8	51	32	4,1
9	Pengawasan periodik yang memadai telah dilakukan kepada semua pegawai sesuai dengan arahan dan revidi terkait pekerjaan yang dilakukan	0	2	11	58	25	4,1

10	Pimpinan SKPA tempat saya bekerja menindaklanjuti segera rekomendasi dan temuan dari pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat)	0	2	6	63	25	4,2
	Rerata						4.0

Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk variabel pengendalian internal memperoleh hasil 4.0 yang artinya bahwa rata-rata jawaban responden adalah sangat setuju yang artinya bahwa pengendalian internal yang ada pada Pemerintah Aceh sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

4.1.4 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 5%, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk, atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk analisis selanjutnya, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas

Nomor Pernyataan		Variabel	R Hitung	R Tabel (N=144) 5%	Ket
1	Y1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,772	0,1376	Valid
2	Y2		0,773		
3	Y3		0,779		

Nomor Pernyataan		Variabel	R Hitung	R Tabel (N=144) 5%	Ket
4	Y4		0,788		
5	Y5		0,717		
6	Y6		0,778		
7	Y7		0,787		
8	Y8		0,773		
9	Y9		0,797		
10	Y10		0,771		
11	Y11		0,771		
12	Y12		0,373		
13	X1.1	Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual (X_1)	0,737	0,1376	Valid
14	X1.1		0,777		
15	X1.3		0,717		
16	X1.4		0,377		
17	X1.5		0,778		
18	X1.6		0,737		
19	X1.7		0,701		
20	X2.1	Kebijakan Akuntansi (X_2)	0,778	0,1376	Valid
21	X2.2		0,771		
22	X2.3		0,555		
23	X2.4		0,558		
24	X2.5		0,555		
25	X2.6		0,502		
26	X2.7		0,201		
27	X2.8		0,552		
28	X2.9		0,355		
29	X2.10		0,555		
30	X2.11		0,552		
31	X3.1	Pengendalian Internal (X_3)	0,525	0,1376	Valid
32	X3.2		0,559		
33	X3.3		0,581		
34	X3.4		0,777		
35	X3.5		0,797		
36	X3.6		0,7		
37	X3.7		0,777		

Nomor Pernyataan		Variabel	R Hitung	R Tabel (N=144) 5%	Ket
38	X3.8		0,3		
39	X3.9		0,277		
40	X3.10		0,23		

Sumber: Data primer yang diolah, (2023)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dinyatakan valid, karena mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam. Dengan demikian semua butir indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.1.5 Pengujian Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Hasilnya seperti dijabarkan pada Tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini handal karena nilai alphanya lebih besar dari 0,60 (Malhotra & Birks, 2017).

Tabel 4.12 Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

NO	Variabel	Item Variabel	<i>cronchbach's alpha</i>	Ket
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	12	0,743	Reliabel
2	Penerapan Standar Akuntansi(X ₁)	7	0,763	Reliabel
3	Kebijakan Akuntansi (X ₂)	11	0,755	Reliabel
4	Pengendalian Internal (X ₃)	10	0,787	Reliabel

Sumber: Data Primer 2023 (diolah).

Berdasarkan analisis reliabilitas dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel diperoleh nilai alpha $> 0,6$. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kehandalan memenuhi kredibilitas.

4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk melakukan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat memberikan hasil yang valid. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian adalah sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dan analisis grafik histogram dan P-P plot.

Tabel 4.13 Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34429204
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.062
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,173 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi atau persyaratan normalitas model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika tidak terdapat atau tidak mengandung multikolinieritas dari hasil uji tersebut maka model regresi tersebut baik. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berikut adalah nilai *tolerance* dan VIF dalam penelitian ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas

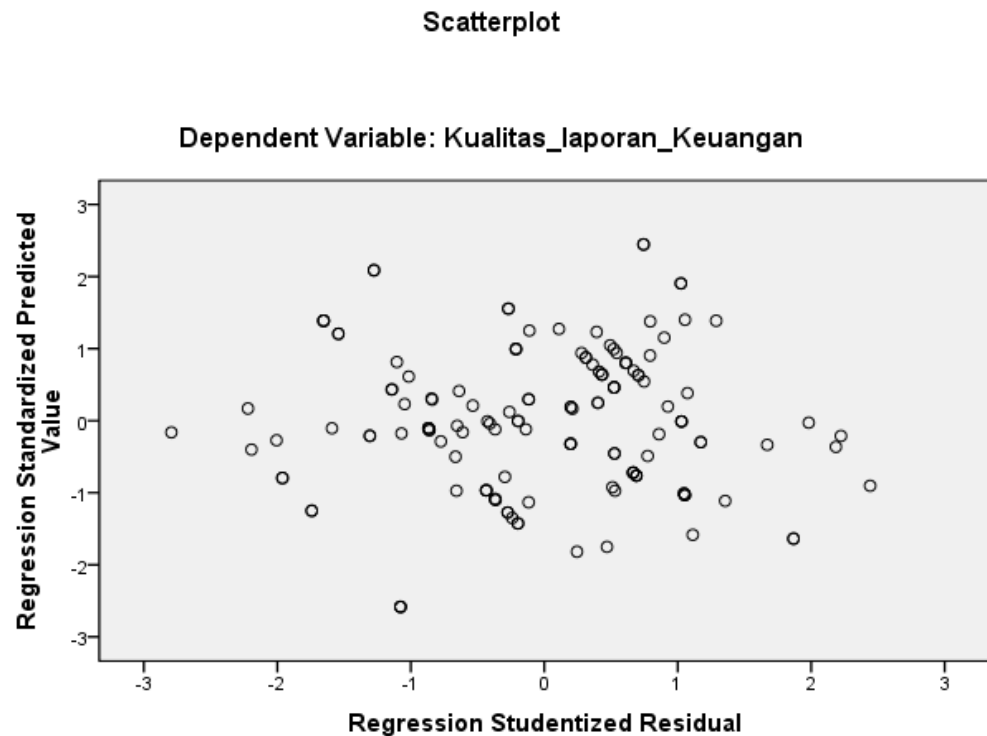
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	.974	1.027
	Kebijakan Akuntansi	.876	1.141
	Pengendalian Internal	.856	1.169

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,10. Nilai VIF sebesar di bawah nilai 10. Menurut (Ghozali, 2016) suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinieritas jika nilai tolerancen kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Kesimpulannya adalah model regresi variabel independen tidak terdapat multikolinieritas dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Menurut (Ghozali, 2016), jika gambar menunjukkan titik-titik yang menandakan komponen-komponen variabel-variabel menyebar secara acak pada bidang scatter maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa data menyebar secara acak maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Gambar 4.2 berikut menyajikan hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 2.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan regresi. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 144 responden diperoleh informasi yang memadai tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), kebijakan akuntansi (X_2), dan pengendalian internal (X_3), terhadap kualitas pelaporan keuangan (Y). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	1.9431	.401
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	.123	.051
Kebijakan Akuntansi	.270	.086
Pengendalian Internal	.190	.069
Koefisien Korelasi (R) = 0,455		
Koefisien Determinasi (R ²) = 0,077		
Adjusted R Square = 0,190		
Sig. F = 0,000		

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS seperti pada Tabel 4.14 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,94 + 0,123X_1 + 0,270X_2 + 0,190X_3 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 1,351 menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), kebijakan akuntansi (X_2), dan pengendalian internal (X_3) sama dengan nol, maka besarnya kualitas pelaporan keuangan adalah 1,94 satuan pada skala interval.

4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), kebijakan akuntansi (X_2), dan pengendalian internal (X_3), terhadap kualitas pelaporan keuangan (Y) dilakukan dengan melihat koefisien regresi (β). Berdasarkan Tabel 4.14 koefisien masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen $\neq 0$ dimana $\beta_1 = 0,123$; $\beta_2 = 0,123$; dan $\beta_3 = 0,270$. Hal ini berarti Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan menerima Hipotesis

alternatif (H_a), artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), kebijakan akuntansi (X_2), dan pengendalian internal (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan (Y).

4.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

a. Hasil Pengujian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap kualitas pelaporan keuangan

Hasil pengujian terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperoleh nilai koefisien regresi β_1 sebesar 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa $\beta_1 \neq 0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a) artinya variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1) sebesar 0,123, artinya setiap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual naik 1 satuan maka kualitas pelaporan keuangan meningkat sebesar 0,123 satuan pada skala interval. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka kualitas pelaporan keuangan akan semakin baik.

b. Hasil Pengujian Pengaruh Kebijakan Akuntansi Terhadap kualitas pelaporan keuangan

Hasil pengujian terhadap variabel kebijakan akuntansi diperoleh nilai koefisien regresi β_2 sebesar 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa $\beta_2 \neq 0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a) artinya variabel kebijakan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Koefisien regresi kebijakan akuntansi

(X_2) sebesar 0,241, artinya kebijakan akuntansi naik 1 satuan maka kualitas pelaporan keuangan meningkat sebesar 0,270 satuan pada skala interval. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya kebijakan akuntansi maka kualitas pelaporan keuangan akan semakin baik.

c. Hasil Pengujian Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap kualitas pelaporan keuangan

Hasil pengujian terhadap variabel pengendalian internal diperoleh nilai koefisien regresi β_3 sebesar 0,190. Hal ini menunjukkan bahwa $\beta_3 \neq 0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a) artinya variabel pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Koefisien regresi pengendalian internal (X_3) sebesar 0,270, artinya pengendalian internal naik 1 satuan maka kualitas pelaporan keuangan meningkat sebesar 0,190 satuan pada skala interval. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya pengendalian internal maka kualitas pelaporan keuangan akan semakin baik.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), Kebijakan akuntansi (X_2) dan pengendalian internal (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil pengujian diperoleh Nilai F hitung sebesar 12,186 $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan Penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), Kebijakan akuntansi (X_2) dan pengendalian internal (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

desa, diantaranya adalah Penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), Kebijakan akuntansi (X_2) dan pengendalian internal (X_3)

Standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut dengan SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Menurut PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Komponen laporan keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penerapan SAP berbasis akrual di dalam lingkungan pemerintah yaitu pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Suharti & Rumsari, 2021). Pada PP 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa SAP Berbasis Akrual dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Hasil penelitian Vania Annissa Holle, (2019) menunjukkan bahwa Variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, hal ini bermakna bahwa dengan adanya pemahaman

mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, hal ini bermakna bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

4.4.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual merupakan standar akuntansi yang wajib diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai tahun 2015. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual merupakan suatu basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pencatatan dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas dan setara kas diterima dan dibayarkan. Basis Akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan basis Kas karena penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif dan relevan dalam pengambilan keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Di tahun 2015 seluruh instansi di Indonesia diharuskan untuk menggunakan basis akrual dalam penggunaan standar akuntansi.

Akuntansi berbasis akrual mengakui elemen laporan keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja. Adanya Peraturan Pemerintah Npmor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan

kualitas laporan keuangan dan perwujudan good governance serta mengetahui kinerja pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual diberbagai negara memberikan manfaat antara lain mendukung kinerja, memfasilitas manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen asset (termasuk kas). Menurut Hoesada (2017), *accrual accounting* dapat memberi informasi lebih lengkap dan baik, sepanjang pembaca mampu menafsir makna dibalik angka Laporan Keuangan akrual, tetap saja dapat tersesat (*mislead*) oleh manipulasi akuntansi akrual yang canggih. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan, akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan. Menyajikan informasi keuangan secara lebih akurat dan lengkap sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Terdapat banyak manfaat menggunakan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan menjadi lebih berkualitas yaitu menjadi lebih jelas, sebanding dan akurat setelah transformasi sistem pemerintahan cash basis akuntansi pemerintah dasar sistem akuntansi akrual. Berdasarkan hasil peneitian yang dilakukan oleh Natalia Christianti, (2013) akuntansi berbais akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Keranayanti, (2016) bahwa, sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Agustiawan, (2016) dengan hasil bahwa Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

4.4.3 Pengaruh kebijakan akuntansi (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Perkembangan dunia saat ini menuntut pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan hanya untuk Perusahaan namun juga untuk pemerintahan. Praktik pelaporan laporan keuangan yang transparan dan mengacu pada standar akuntansi berbasis akrual yang dapat diperbandingkan secara internasional mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 01, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas diantaranya : 1. Keandalan (*Reliability*)

2. Relevan (*Relevance*) 3. Dapat Dipahami (*Understandability*) 4. Dapat Dibandingkan (*Comporability*).

4.4.4 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan desa. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Mulyati, Sri, et al., 2019).

Sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati, Sri, et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa ssstem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Sementara itu hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan sebesar 41,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnani (2017) diperoleh hasil bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Dalam

penelitian ini penatausahaan aset tetap mempunyai peranan penting dalam memediasi pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan. Peneliti selanjutnya adalah Rendika (2013), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif dan signifikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati et al., (2019), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Sejalan dengan penelitian ini Firmansyah & Sinambela (2020) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Aditya Sanjaya, 2017) Weygandt J.J., et al. (2005) mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel). Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang

sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Susilawati, (2014), sistem pengendalian intern secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Munasyir, (2015) dengan hasil bahwa sistem pengendalin intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kulitas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1), Kebijakan akuntansi (X_2) dan pengendalian internal (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Kebijakan akuntansi (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pengendalian Internal (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

5.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih dari satu Kabupaten, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa seperti faktor sumber daya manusia, komunikasi, pembagian kerja, jabatan, penerepan sistem akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M.S., Purnomo, R., Jati, E. . (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Otonom dan Internal Locus of Control Terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Performance*, 26 (2), 66–76.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Erlina, R., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat.
- Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Syntax Admiration*, 1(5), 527–537.
- Faishol, A. (2016). *Ahmad Faishol*. I(3), 205–212.
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land*, 1(1), 1–15.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Main. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 8619.
- Hikma, N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6, 7–10.
- Holle, Vania Annisa. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntanasi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih*, 14(1), 16–35.
- Holle, Vania Annisa. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi 90 Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah. Universitas Cenderawasih, Volume 14*,.

- Kiranayanti, Ida Ayu, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16, 1290–1318.
- Kusmardiyah, A. (2018). Analisis Pengaruh Penerapan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12.
- Lestari, N. L., Dewi, N. N., & Trisna. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Malhotra, N., & Birks, D. (2017). *Marketing Research: an Applied Approach*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntapedia*, 1(1), 60–71.
- Mulyati, Sri, N., Faridah, Eva, Prawiranegara, & Benny. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntapedia*, 1(1), 60–71.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri, N. R., & Agustiawan, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar). *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1996>
- Putriasri Pujanira, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, VI(4).
- Rahmawati, N. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.(1), 671–700.
- Rasyid, Y. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 1–12.
- Rendika, M. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–18.
- Roviyantie, D. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Safitri, D. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 174–189.
- Setiawan, I. W. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 671–700.
- Simanjuntak, Y. E. (2015). Pengaruh Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Repository Universitas HKBP Nommensen*, 2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16, 95–104.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*.
- Taufiqurrohman, Mudawanah, S., & Muthanudin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 103–112.
- Trisnani. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 271–282.
- Triwahyuni, M. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (Studi pada pemerintah daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, 3(1), 2312–2326.

Yusriwati, & Susanti, N. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sistem pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 16–35.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DI
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH**

Karakteristik Responden		
1) Jenis Kelamin		
1) Laki-laki		
2) Perempuan		
2) Jabatan		
1) PPK		
2) Kasubbag Keuangan		
3) Bendahara		
4) Staf Bagian Keuangan		
3) Golongan		
1) Golongan IV		
2) Golongan III		
3) Golongan II		
4) Golongan I		
4) Usia Responden		
1) < 30 Tahun		
2) 31 – 40 Tahun		
3) 41 – 50 Tahun		
4) > 50 Tahun		
4) Pendidikan Terakhir		
1) SMA		
2) Diploma		
2) Sarjana		
3) Magister		
4) Doktor		

Petunjuk Pengisian:

- i. Beri tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dipilih sesuai keadaan yang sebenarnya dan jawablah pertanyaan dengan jujur.
- ii. SS: Sangat Setuju, S: Setuju; KS: Kurang Setuju; TS: Tidak Setuju; STS: Sangat Tidak Setuju

A. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)

A. KEMERDEKAAN LARUTAN KEUANGAN (1)								
No	Pernyataan	Kode	Respon					
			SS	S	KS	TS	STS	
Relevan								
1.	Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	A1						
2.	Laporan keuangan disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini.	A2						
3.	SKPA telah bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.	A3						
Andal								
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.	A4						
5.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material	A5						
6.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	A6						
Dapat dibandingkan								
7.	Informasi keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	A7						
8.	Penyusunan laporan keuangan telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.	A8						
9.	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke	A9						

	tahun						
Dapat dipahami							
10.	Informasi keuangan yang harus dapat dipahami oleh pengguna	A10					
11.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna	A11					
12.	Laporan Keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti	A12					

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015).

B. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (X1)

No	Pernyataan	Kode	Respon				
			SS	S	KS	TS	STS
Penerapan Basis Akrual							
1.	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi	B1					
2.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto	B2					
Penerapan Basis Kas							
3.	Saya selalu menerapkan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi	B3					
4.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dan aktivitas operasi	B4					
Penyajian Secara Wajar							
5.	Saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan	B5					
6.	Saya selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi	B6					
7.	Saya selalu menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas	B7					

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI (X2)

No	Pernyataan	Kode	Respon				
			SS	S	KS	TS	STS
Pengakuan Pendapatan dan belanja							
1.	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan penerimaan sesuai dengan PSAP No. 2	C1					
2.	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan belanja sesuai dengan PSAP No. 2	C2					
3	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto	C3					
Pengakuan Aset							
4.	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan Asset sesuai dengan PSAP No. 7	C4					
5	Kebijakan akuntansi telah mengklasifikasikan Asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas	C5					
6	Hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi diakui dan di catat dalam persediaan	C6					
7	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas	C7					
Pengakuan Kewajiban							
8.	Kebijakan akuntansi yang ada telah mengatur pengakuan kewajiban sesuai dengan PSAP	C8					
9	Kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau diakui pada saat kewajiban timbul	C9					
10	Kewajiban dicatat sesuai dengan nilai nominal.	C10					
11	Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan diakui kewajiban pada saat kewajibannya timbul	C11					

Sumber: Ni Made Sudiaranti, dkk (2015).

D. PENGENDALIAN INTERNAL (X4)

No	Pernyataan	Kode	Respon				
			SS	S	KS	TS	STS
Lingkungan Pengendalian							
1.	Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten	D1					
2.	SKPA memiliki struktur organisasi yang jelas mengenai seluruh fungsi yang ada dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab	D2					
Penilaian Resiko							
3.	Pimpinan tempat saya bekerja telah melakukan analisis secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap pelaporan keuangan	D3					
4.	Pimpinan tempat saya bekerja selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap pelaporan keuangan	D4					
Aktivitas Pengendalian							
5.	Pimpinan tempat saya bekerja telah melakukan analisis secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya risiko pelanggaran terhadap pelaporan keuangan	D5					
6.	Aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja	D6					
Informasi dan Komunikasi							
7.	Informasi keuangan dan anggaran yang memadai sudah disediakan guna mendukung penyusunan laporan keuangan pada SKPA	D7					
8.	Setiap pegawai SKPA tempat saya bekerja mempunyai saluran komunikasi yang baik terhadap atasan langsung baik formal maupun non formal	D8					
Pemantauan							
9.	Pengawasan periodik yang memadai telah dilakukan kepada semua pegawai sesuai dengan arahan dan reviu terkait pekerjaan yang dilakukan	D9					

10.	Pimpinan SKPA tempat saya bekerja menindaklanjuti segera rekomendasi dan temuan dari pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat)	D10					
-----	--	-----	--	--	--	--	--

Lampiran

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas_laporan_Keuangan	144	3.33	5.00	4.3184	.38664
Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintahan_Berbasis_Akrual	144	2.57	5.00	3.7426	.58334
Kebijakan_Akuntansi	144	3.18	4.82	4.2016	.36030
Pengendalian_Internal	144	3.20	5.00	4.1015	.45796
Valid N (listwise)	144				

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34429204
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.062
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173
a. Test distribution is Normal.		

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengendalian_Internal, Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintahan_Berbasis_Akrual, Kebijakan_Akuntansi ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas_laporan_Keuangan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.455 ^a	.207	.190	.34796

a. Predictors: (Constant), Pengendalian_Internal,
Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintahan_Berbasis_Akrual, Kebijakan_Akuntansi

b. Dependent Variable: Kualitas_laporan_Kuangan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.426	3	1.475	12.186	.000 ^a
	Residual	16.951	140	.121		
	Total	21.377	143			

a. Predictors: (Constant), Pengendalian_Internal,
Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintahan_Berbasis_Akrual,
Kebijakan_Akuntansi

b. Dependent Variable: Kualitas_laporan_Kuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.943	.401		4.852	.000		
Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintahan_Berbasis_Akrual	.123	.051	.186	2.436	.016	.974	1.027
Kebijakan_Akuntansi	.270	.086	.251	3.127	.002	.876	1.141
Pengendalian_Internal	.190	.069	.225	2.771	.006	.856	1.169

a. Dependent Variable: Kualitas_laporan_Kuangan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.8640	4.7487	4.3184	.17594	144
Std. Predicted Value	-2.583	2.446	.000	1.000	144
Standard Error of Predicted Value	.031	.128	.056	.016	144
Adjusted Predicted Value	3.8861	4.7337	4.3172	.17591	144
Residual	-.95993	.84040	.00000	.34429	144
Std. Residual	-2.759	2.415	.000	.989	144
Stud. Residual	-2.794	2.441	.002	1.005	144
Deleted Residual	-.98476	.85846	.00121	.35550	144
Stud. Deleted Residual	-2.865	2.486	.001	1.012	144
Mahal. Distance	.131	18.410	2.979	2.440	144
Cook's Distance	.000	.194	.008	.018	144
Centered Leverage Value	.001	.129	.021	.017	144

a. Dependent Variable: Kualitas_laporan_Kuangan

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: Kualitas_laporan_Keuangan

